

**KONSEP DEMOKRASI DALAM
PERSPEKTIF AMIEN RAIS**

SKRIPSI



PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

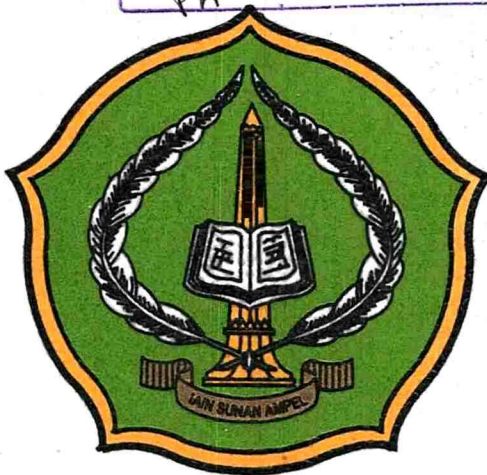
No. KLAS

K
U-2008
016
PA

No. REG : U-2008/PA/016

ASAL BUKU:

TANGGAL :



Disusun Oleh :

MIFTAHUS SURUR
NIM. EO2304014

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **MIFTAHUS SURUR** ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 24 Juli 2008

Pembimbing,



Drs. Zainal Arifin
Nip. 150 220 818

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Miftahus Surur ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 07 Agustus 2008

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



BRS. H. MA'SHUM NURALIM, M. Ag.
NIP. 150 240 835


Tim Penguji:

Ketua,



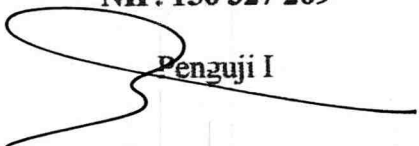
DRS. ZAINAL ARIFIN
NIP. 150 220 818

Sekretaris



DRS. ANDI SUWARKO, M. Si
NIP. 150 327 209

Penguji I



DRS. H. MUHAMMAD ACHYAR, M.Si
NIP. 150 186 637

Penguji II



DRS. EKO TARANGGONO, M. PD, I
NIP. 150 224 887

ABSTRAKSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Skripsi dengan judul ***Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Amien Rais*** ini adalah penelitian *literer* atau kepustakaan (*Library Research*) tentang konsep demokrasi Amien Rais. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep demokrasi dalam perspektif Amien Rais.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode telaah dokumenter. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk mengungkap sejarah biografi Amien Rais. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk mengungkap pemikiran konsep demokrasi Amien Rais.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah konsep demokrasi Amien Rais yaitu; Pertama, negara harus dilakukan di atas dasar atau sila keadilan. Yang dimaksudkan dengan keadilan disini tidak sebatas pada keadilan didepan hukum bagi semua warganya, tetapi juga keadilan dibidang ekonomi dan sosial. Kedua, sistem politik demokratis harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Ini berarti pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan karenanya mereka harus dipilih oleh rakyat melalui suatu proses pemilu yang bebas. Ketiga, adanya prinsip persamaan hak bagi seluruh rakyat. Amien Rais menegaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan orang atas dasar perbedaan gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang ekonomi, sosial, dan asal usul keturunannya.

Keempat, soal kebebasan. Amien Rais secara tegas mengungkapkan, negara demokratis harus menjamin prinsip kebebasan yang menyangkut kebebasan berpikir, beragama, berbicara, bebas mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan, hak hidup secara aman dan tenteram dan juga bebas untuk bergerak kemana saja sesuai dengan keinginannya. kelima ialah *accountability*, para pemimpin pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada rakyat.

Adapun pandangan Amien Rais terhadap berlakunya demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi merupakan suatu keharusan karena demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Selain itu demokrasi juga sebagai sistem politik dan pemerintahan yang mempunyai akar sejarah panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Demokrasi juga merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Judul	6
D. Alasan Memilih Judul	7
E. Tujuan Yang Ingin Dicapai	8
F. Sumber Yang Digunakan	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II DEMOKRASI TINJAUAN UMUM.....	14
A. Pengertian Demokrasi	14
B. Prinsip Dan Parameter Demokrasi	20

	C. Sejarah Perkembangan Demokrasi	25
BAB III	AMIN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA	38
	A. Biografi M. Amien Rais	38
	B. Konsep Demokrasi Amien Rais	42
	C. Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Amien Rais.....	49
	1. Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia.....	49
	2. Representasi Umat Harus Diperjuangkan	54
	3. Pengaruh Islam Terhadap Pemikiran Amien Rais	57
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AMIEN RAIS	67
	A. Demokrasi Tinjauan Umum	67
	B. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia	72
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	79

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan lafadz dari istilah Barat yang digunakan untuk menunjukkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat dianggap sebagai penguasa mutlak dan pemilik kedaulatan yang berhak mengatur urusannya sendiri, serta melaksanakan dan menjalankan kehendaknya sendiri. Rakyat tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan siapapun selain kekuasaan rakyat. Rakyat berhak membuat peraturan dan undang-undang sendiri karena mereka adalah pemilik kedaulatan, yaitu melalui para wakil rakyat yang mereka pilih. Rakyat berhak pula menerapkan peraturan dan undang-undang yang telah mereka buat melalui para penguasa dan hakim yang mereka pilih dan keduanya mengambil alih kekuasaan dari rakyat, karena rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Anggota-anggota lembaga legislatif dipilih berdasarkan suara mayoritas pemilih dari kalangan rakyat. Penetapan peraturan dan undang-undang, pemberian mosi percaya atau tidak percaya kepada pemerintah dalam dewan perwakilan, ditetapkan pula berdasarkan suara mayoritas. Demikian pula penetapan semua keputusan dalam dewan perwakilan, kabinet, bahkan dalam seluruh dewan, lembaga, dan organisasi lainnya, ditetapkan berdasarkan suara mayoritas.

¹ Eggi Sudjana, *Ham, Demokrasi dan Lingkungan Hidup* (Yayasan As-Syahidah, 1998), 70

Pemilihan penguasa oleh rakyat baik langsung maupun melalui para wakilnya, ditetapkan pula berdasarkan suara mayoritas pemilih dari rakyat.²

Demokrasi tidak hanya berarti hak memilih pemerintah meskipun ini juga hal yang sangat penting. Demokrasi merupakan keseluruhan bentuk hak yang harus bisa dimiliki warga negara apabila suatu pemerintahan itu terbuka, dapat dipercaya dan partisipatif. Hak-hak ini meliputi kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pres, kebebasan berserikat, misalnya serikat buruh atau kelompok penekan; akses kepada informasi khususnya mengenai rencana pemerintah terutama bagi mereka yang terkena langsung dan hak untuk di ajak berbicara dalam keputusan seperti ini, serta kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, apakah itu berdasarkan jenis kelamin, ras ataupun agama.³

Dewasa ini masyarakat internasional modern tampak berkecenderungan kuat menerima gagasan pokok bahwa pemerintahan diciptakan untuk kepentingan rakyatnya. *Demos Cratia* kembali dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik. Setiap negara modern menerima mutlak perlunya demokrasi ditegakkan. Jika suatu negara gagal menerjemahkan substansi demokrasi dalam praktik politik, negara tetap berusaha mengambil format demokratik bagi pemerintahannya dan memberikan nama demokrasi secara jelas, walaupun diberi tambahan pridakat-predikat tertentu.⁴

² Sudjana, *Ham, Demokrasi*....., 75

³ John Clark, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, ter. Godril Dibyo Yuwono (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1995), 18

⁴ Amien Rais, "Pengantar", dalam *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), xvi

Negara-negara yang baru merdeka setelah perang Dunia ke II memang mempunyai beberapa pilihan tentang sistem politik dan sistem ekonomi yang akan diambil untuk mengisi kemerdekaannya, namun dapat dikatakan pada umumnya negara-negara yang baru merdeka itu memilih demokrasi, terutama seperti yang dikembangkan oleh negara bekas penjajahnya dengan disesuaikan sejauh mungkin dengan tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.⁵

Dalam soal demokrasi Amien Rais menyatakan bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan menangani warisan-warisan *otoritarianisme* dalam sikap, keyakinan dan kelembagaan. Namun agenda kerja demokratisasi kekuasaan itu perlu mendapat perhatian serius dalam rangka mengembangkan format politik yang bersih dari penyalahgunaan kekuasaan, dan pada saat bersamaan memberikan peluang bagi peran serta yang lebih luas dibanding pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Bila proses pelembagaan demokrasi sebagai hasil dari demokratisasi kekuasaan di arena pengambilan kebijakan, demokrasi kekuasaan menciptakan batasan-batasan bagi partisipasi rakyat, dan demokrasi mencakup penanganan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam jangka panjang.⁶

Secara umum, demokrasi kita pahami sebagai sistem pemerintahan yang mengandung prinsip *checks and balances*, kontrol, akuntabilitas dan sebagainya. Sementara Islam secara normatif hanya memberikan aturan-aturan yang sangat

⁵ Rais, "Pengantar", dalam *Demokrasi*....., xxix-xxx

⁶ Sudono Syueb, *Amien Rais & Demokratisasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka, 2006), 7

prinsipil, dan tidak mengaturnya secara detail dan hal-hal yang sifatnya praktis. Selama ini para pemikir Islam selalu mengatakan bahwa ciri utama Islam adalah moderat; dengan kata lain Islam kompatibel dengan demokrasi, tapi kenyataannya antara cita-cita dan realitas terdapat pertentangan.⁷

Preferensi seorang intelektual Muslim terhadap demokrasi bisa muncul karena alasan yang berbeda-beda. Preferensi itu muncul setelah melakukan reinterpretasi ajaran Islam secara normatif menganggap Islam kompatibel dengan demokrasi, demokrasi adalah bentuk masyarakat ideal, demokrasi adalah keharusan sejarah yang tidak terelakkan, atau karena demokrasi dianggap sebagai sistem politik paling efektif dan rasional yang mampu melindungi manusia dari penindasan dan eksploitasi manusia lain. Kerangka pemikiran yang dibangun Amien Rais yang berpusat pada konsep tauhid menghendaki suatu konstruksi masyarakat atau negara yang bebas dari penindasan, eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Penindasan, eksploitasi, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan merupakan sesuatu yang bertolak belakang secara diametrisal dengan semangat tauhid.⁸

Kaum intelektual Muslim sering menyatakan bahwa ciri utama gerakan politik Islam di Indonesia adalah karakter demokrasi dan anti otoriter mereka, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Agama Islam identik dengan nilai-

⁷ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan et.* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 231-232

⁸ Amarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 106

nilai yang terkandung dalam demokrasi. Dalam kaitan ini Amien Rais tidak melihat pertentangan sedikitpun antara Islam dengan proses demokratisasi.⁹

Perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat yang didaamnya institusi *amar makruf nahi munkar* berfungsi efektif, menurut Amien Rais, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi. Dalam pandangannya esensi demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat dan aspirasi rakyat harus mengejawantah dalam kehidupan eksekutif dan legislatif. Konsekuensinya, harus ada mekanisme pertanggung jawaban politik kepada rakyat, karena aspirasi rakyat merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Mekanisme pertanggungjawaban itu sendiri akan lebih fungsional dan efektif jika institusi *amar ma'ruf nahi munkar* berjalan semestinya, baik pada level infrastruktur, suprastruktur politik maupun di antara keduanya.¹⁰

Untuk lebih menegaskan topik yang akan dikaji, konsep demokrasi dalam perspektif Amien Rais belum pernah diteliti di Jurusan Perbandingan Agama, oleh karena itu penulis akan mencoba mengkaji dan meneliti, sejauh mana Amien Rais dalam memberi konsep demokrasi dan bagaimana pandangan Amien Rais terhadap berlakunya demokrasi di Indonesia.

⁹ Tamrin, *Gagasan Demokrasi Amien Rais* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 31

¹⁰ Masdar, *Membaca Pikiran* , 107-108

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep demokrasi menurut Amien Rais?
2. Bagaimana pandangan Amien Rais terhadap berlakunya demokrasi di Indonesia?

C. Penegasan Judul

Untuk menghindari dan menjaga anggapan yang salah terhadap pengertian judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan masing-masing istilah yang terdapat didalamnya, sehingga dapat difahami dengan mudah judul tersebut:

- Konsep : Ide umum; pengertian; pemikiran; rancangan; rencana dasar.¹¹
- Demokrasi : Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*crates*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.¹²

¹¹ Pius A Partanto & Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola), 362

¹² Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 110

- **Perspektif** : Cara melukiskan suatu benda dan sebagainya pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).¹³
- **Amien Rais** : Seorang intelektual Islam dan sekaligus ilmuwan politik, ia merupakan kolumnis yang tergolong produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya.¹⁴

Setelah penulis menguraikan satu persatu dari istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud judul tersebut yaitu bagaimana Konsep Demokrasi Dalam Perspektif Amien Rais.

D. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul tersebut diatas adalah

1. Karena demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan yang paling baik , sedangkan dengan Islam terjadi pro dan kontra.
2. Karena Amien Rais merupakan tokoh Islam yang pro dengan demokrasi. Bagaimana Amien Rais memberi konsep terhadap demokrasi di Indonesia.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 760

¹⁴ Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 15

E. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Sebagaimana lazimnya penelitian-penelitian yang ada maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin menjelaskan konsep demokrasi menurut Amien Rais.
2. Ingin menjelaskan pandangan Amien Rais terhadap berlakunya demokrasi di Indonesia?

F. Sumber Yang Digunakan

Adapun data-data yang diambil dari penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang bersumber dari buku-buku atau tulisan dari Amien Rais, khususnya yang berkenaan dengan yang dibahas yaitu Konsep Demokrasi Amien Rais. Data-data primer tersebut antara lain:

1. *Demokrasi Dan Proses Politik*, Amien Rais, “Pengantar”, LP3ES, buku ini berbicara banyak tentang demokrasi dalam tradisi bangsa, baik itu mengenai demokrasi dalam sejarah, kriteria demokrasi, demokrasi di Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia.
2. *Membangan Politik Adiluhung*, M. Amien Rais, Zaman Wacana Mulia, buku ini berisi kisah hidup Amien Rais, akhlak politik dan demokrasi
3. *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, Amien Rais, Pustaka Pelajar, didalamnya membahas tentang situasi politik nasional dan situasi politik internasional

4. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Amien Rais, Mizan, buku ini berbicara banyak tentang tauhid, negara, dan politik.
5. *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Muhammad Najib, Gema Insani Press, buku ini berisi mengenai visi suksesi Amien Rais, pro dan kontra suksesi dan opini masyarakat tentang demokrasi.
6. *Amien Rais & Demokratisasi di Indonesia*, Sudono Syueb, Pustaka, dalam buku ini dibahas masalah peran sejarah Amien Rais, tujuh belas langkah membangun Indonesia dan masalah reformasi di Indonesia.

Sedangkan data-data sekunder adalah data-data yang mendukung pembahasan, yakni buku-buku atau tulisan selain Amien Rais yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data-data sekunder tersebut diantaranya:

1. *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Amarudin Masdar, Pustaka pelajar, yang berisi sketsa biografis Amien Rais, paradikma pemikirannya dan visi Islam dan demokrasi.
2. *Gagasan Demokrasi Amien Rais Dalam Teori Politik Islam Indonesia*, Tamrin, Andalas University Press, digalamnya menjelaskan teori demokrasi Amien Rais, ide-ide demokrasi Amien Rais dan persoalan hubungan antara negara dengan Islam.
3. *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Masykuri Abdillah, PT. Tiara Wacana yoga, duku ini berisi konsep demokrasi, nilai-nilai demokrasi dan demokrasi di Indonesia.

4. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Azyumardi Azra, Prenada Media, buku ini berisi hakekat demokrasi, prinsip demokrasi, Islam dan demokrasi.
5. *Islam Demokarasi Atas Bawah*, Arief Afandi, Pustaka Pelajar, didalamnya terdapat artikel tentang representasi umat harus diperjuangkan.

i. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat literer atau biasanya disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁵, yaitu data-data yang penulis perlukan akan dicari dan dikumpulkan dari buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan yang ada dalam perpustakaan dan ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah *historis* tokoh, yaitu penelitian yang menjelaskan bagaimana pemikiran seorang tokoh yaitu Amien Rais yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menyangkut pemikirannya tentang konsep demokrasi.

Maka pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis digunakan mengingat salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu penelitian terhadap seorang tokoh

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 28

dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide, serta pembentukan watak seorang tokoh tersebut selama hidupnya.¹⁶ Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis pemikiran seorang tokoh tentang suatu masalah.¹⁷

3. Metode pengumpulan data

Dalam rangka mengumpulkan data, penulis menggunakan metode telaah dokumenter, mengumpulkan, membaca dan menelaah apa-apa yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dengan mengadakan selektif, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan menyeleksi atau dipilih data yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka pengolahannya menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang lebih ditekankan adalah kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji secara empiris dan bukan segi kuantitatifnya. Selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan metode;

- a. Metode diskriptif¹⁸, yaitu peneliti menguraikan secara teratur seluruh konsepsi tokoh Amien Rais tentang konsep demokrasi, kemudian data yang di eksplisitkan (jelas) memungkinkan dapat dipahami secara benar.
- b. Deduksi, yaitu cara yang dipakai penulis untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang

¹⁶ Muhammad Nazir, metode penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 62

¹⁷ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 42

¹⁸ *Ibid*, 42 dan 48

bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

Penggunaan metode ini dititik beratkan pada pembahasan untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep demokrasi secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus tentang konsep demokrasi menurut Amien Rais

- c. Induksi, yaitu jalan yang dipakai penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁰ Pendekatan metode ini digunakan untuk menganalisis dengan menguraikan pemikiran Amie Rais tentang konsep demokrasi sehingga bagian-bagian pemikiran dapat dipahami sebagai suatu pemikiran yang utuh.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka adanya sistematika pembahasan merupakan faktor yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab satu akan membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁹ Sudarto, *Metode penelitian*....., 58

²⁰ *Ibid*, 57

Bab dua akan membahas mengenai demokrasi tinjauan umum, yang terdiri dari pengertian demokrasi, Prinsip dan parameter demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi.

Pada bab ketiga akan membahas mengenai Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia, yang terdiri dari biografi M. Amien Rais, Konsep demokrasi Amien Rais, dan demokrasi di Indonesia dalam perspektif Amien Rais, yang meliputi demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, representasi umat harus diperjuangkan, dan pengaruh Islam terhadap pemikiran Amien Rais.

Bab ke empat akan dibahas mengenai analisis data tentang pemikiran Amien Rais, yang meliputi demokrasi tinjauan umum dan Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia.

Bab lima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di isi dengan jawaban dari hasil penelitian tentang konsep demokrasi dalam perspektif Amien Rais.

BAB II

DEMOKRASI: TINJAUAN UMUM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos cratein* atau *demos cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif (bersaing) atas suara rakyat.
2. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak

¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 110

langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Linn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik atau warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Memakai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.²

Dari definisi tersebut mengimplikasikan bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur: kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa dalam penggunaan kontemporenya, demokrasi didefinisikan lebih pragmatis (nyata) ketimbang filosofis. Pada zaman

² Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 110-111

pencerahan, demokrasi pada mulanya didefinisikan dalam pengertian yang lebih filosofis, yakni dengan ide kedaulatan rakyat sebagai lawan kedaulatan Tuhan (teokrasi), dan sebagai lawan kedaulatan monarki (kerajaan). Disamping definisi-definisi tersebut ada juga konsep demokrasi yang diajukan oleh negara-negara komunis dan negara-negara dunia ketiga, termasuk negara-negara Muslim. Konsep-konsep ini dimaksudkan selain untuk membenarkan kebijakan pemerintah, juga untuk menyesuaikan konsep demokrasi dengan nilai-nilai pribumi dan budaya bangsa tertentu.

Sekarang ini istilah demokrasi bagi banyak orang dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai, perjuangan untuk kebebasan dan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya tertentu. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl bahkan mengarakterasikan demokrasi bukan sebagai kekuasaan "otoritas" otoritarian, zalim, diktator, tirani, totalitarian, absolut, tradisional, monarki, oligarki, plutokrasi, aristokrasi, dan kesultanan, hal ini juga berarti bahwa demokrasi tidak hanya berhubungan dengan institusi formal, tetapi juga dengan eksistensi nilai-nilainya dalam kehidupan sosial dan politik.³

³ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yoga, 1999), 73-75

Pengertian demokrasi yang kita jalani sekarang sebenarnya mengacu pada prosedur, pada cara rekrutmen orang untuk mengisi jabatan-jabatan publik yang strategis, dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin. Jadi, yang khas dalam demokrasi adalah prosedur itu. Kalau ada orang yang menyebut “demokrasi prosedural”, itu hanya kata yang tidak perlu dan menambahkan kata sifat yang berlebih-lebihan. Sebab demokrasi memang menyangkut prosedur, dan karena itu dengan sendirinya “prosedural”.

Sedangkan apa yang disebut “demokrasi substantif” itu sebenarnya merupakan istilah untuk merespon pandangan atau gagasan-gagasan yang berada diluar demokrasi. Mereka misalnya, bicara bahwa demokrasi adalah “kekuasaan oleh rakyat”, dan yang dimaksud rakyat adalah masyarakat kelas bawah. Argumen lanjutannya: demokrasi adalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat bawah. Ideal seperti ini dalam praktiknya diwujudkan misalnya dalam sistem komunisme. Sistem komunis itulah yang menurut versi ini, merupakan demokrasi yang sesungguhnya, setidaknya sebagai salah satu versi dari demokrasi substantif.⁴

Substansi demokrasi keluar dari definisi istilah-istilah akademis menghendaki masyarakat untuk memilih seseorang yang akan memerintah mereka serta mengatur urusan mereka memilih seorang penguasa atau sistem yang tidak mereka sukai, selain itu menurut demokrasi, mereka harus memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban kepada penguasa apabila ia melakukan kesalahan,

⁴ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan* et. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 126

dan menurunkan apabila melakukan penyelewengan. Inilah substansi demokrasi yang implementasinya diinstitutionalisasikan dalam pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, sistem multipartai, hak minoritas untuk berposisi serta kebebasan pers, independensi lembaga peradilan dan sebagainya.

Namun, demokrasi mempunyai dimensi makna dan persoalan yang cukup kompleks, tidak hanya menyangkut elemen-elemen substansial, tetapi juga formal-prosedural. Demokrasi tidak hanya menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem yang didalamnya dapat direalisasikan tingkat kesejahteraan atau kemaslahatan rakyat yang tinggi, tetapi juga menyediakan beberapa mekanisme menyangkut pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan upaya penyejahteraan itu. Dalam demokrasi, setiap mekanisme pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diinstitutionalisasikan dalam dewan perwakilan rakyat. Aksioma (kebenaran mutlak) ini didasarkan pada asumsi bahwa yang paling tahu tentang yang baik dan bernilai fungsional (masalah) bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri.⁵

Dalam pengertian modern demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang memiliki pola relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Karena itu secara universal demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat

⁵ Amarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 16-17

(*government of the people, by people, for the people*)⁶ Ulf Sundhussen menjelaskan bahwa semua sistem demokrasi menganut dua prinsip: kebebasan dan persamaan, dari kedua prinsip ini rumusan demokrasi dielaborasi (pengerjaan dengan teliti) dalam konteks definisi yang bersifat terbuka terhadap interpretasi (tafsiran), utamanya ketika menyangkut implementasi kedaulatan rakyat dalam praktek politik.⁷

Pengertian demokrasi ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas (komprehensif). Pengertian sempit demokrasi dirumuskan oleh Joseph Schumpeter. Baginya demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memimpin pemilih politik. Kemampuan untuk memilih pemimpin diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi. Dengan definisi demokrasi secara minimalis, gerakan sosial tidak dipandang penting dalam proses demokratisasi dan issue-issue jender menjadi tersisihkan, karena demokrasi yang politis ini didefinisikan secara sempit untuk hanya memasukkan lembaga-lembaga elite dalam wilayah publik.

Sedangkan pengertian demokrasi yang luas (komprehensif), tidak hanya mencakup pengertian demokrasi secara sempit atau pengertian demokrasi secara politik, tetapi juga mencakup pengertian demokrasi secara sosial dan ekonomi. Pengertian demokrasi secara luas (komprehensif) ini diantaranya dikemukakan

⁶ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 15

⁷ Tamrin, *Gagasan Demokrasi Amien Rais* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 7-8

oleh David Held. Held menggabungkan pemahaman pandangan liberal dan tradisi Marxis untuk sampai kepada pengertian demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi.

Pembuatan prinsip yang disebut oleh Held tersebut sebagai otonomi demokrasi (*demokrasi autonomy*) membutuhkan baik akuntabilitas (tanggung jawab) negara dalam derajat yang tinggi dan suatu pemesanan kembali masyarakat sipil. Termasuk juga didalamnya adalah hak-hak sosial dan ekonomi, “tanpa hak-hak sosial dan ekonomi yang kuat, hak-hak yang berhubungan dengan negara tidak dapat diperoleh sepenuhnya: dan tanpa hak-hak negara (*state rights*), wujud baru ketimpangan kekuasaan, kesejahteraan dan status secara sistematis akan mengacaukan implementasi kebebasan sosial dan ekonomi”

Pengertian demokrasi secara luas (komprehensif) ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Uhlin berguna untuk menganalisa negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang didalamnya ketiadaan demokrasi di wilayah sosial dan ekonomi akan dapat membuat demokrasi politik dalam bentuk pemilihan dan sebagainya sulit diwujudkan. Dengan konsep demokratisasi secara luas ini gerakan-gerakan sosial dan issue-issue jender mendapat perhatian.⁸

B. Prinsip Dan Parameter Demokrasi

Sebuah pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah

⁸ Tamrin, *Gagasan Demokrasi*....., 10-11

prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat.

Sementara itu Inu kencana lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi yaitu: adanya pembagian kekuasaan, adanya pemilihan umum yang bebas, adanya menegemen yang terbuka, adanya kebebasan individu, adanya peradilan yang bebas, adanya pengakuan hak minoritas, adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, adanya pers yang bebas, adanya beberapa partai politik, adanya musyawarah, adanya persetujuan parlemen, adanya pemerintahan yang konstitusional, adanya ketentuan tentang pendemokrasian, adanya pengawasan terhadap administrasi publik, adanya perlindungan hak asasi, adanya pemerintahan yang bersih, adanya persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, adanya kebijaksanaan negara dan adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab.⁹

Suasana kehidupan yang demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk manusia Indonesia. Karena itu demokrasi tidak boleh menjadi gagasan yang utopis (impian) dan berada dalam alam rerorika semata, melainkan sebagai sesuatu yang mendesak dan harus diimplimentasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Prinsip-prinsip negara

⁹ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 122-123

demokrasi yang telah disebut di atas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan disuatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek.

Pertama, masalah pembentukan negara. Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum, dipercaya sebagai salah satu instrumen atau alat penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik.

Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi atau pembenaran kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif (pembagian) untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu "tangan atau wilayah". Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu tata aturan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridor atau dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut memastikan setidaknya dua hal utama, yakni:

1. Meungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi;
2. Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.¹⁰

¹⁰ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 123-124

Keempat, masalah kontrol rakyat. Apakah dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris atau serupa benar, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis dalam suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dinikmati dan dilaksanakan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Kedua, penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (*supremasi of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before of law*) dan jaminan terhadap HAM; ketiga, kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. Keempat, kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. Kelima, pengakuan hak minoritas. Keenam, pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. Ketujuh, sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. Kedelapan, keseimbangan dan keharmonisan. Kesembilan, tentera yang profesional sebagai kekuatan pertahanan, dan kesepuluh yaitu lembaga peradilan yang independen.

G. Bingham Powel jr menambahkan kriteria lain sebagai parameter demokrasi yaitu; pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon

alternatif. Partisipasi orang dewasa sebagai pemilih dan calon yang dipilih.

Pemilihan bebas. Dan warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berorganisasi serta membentuk partai politik.

Pendapat berikut dikemukakan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa negara dikatakan demokratis bila; hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas, hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintah, pemerintah harus terbuka, kepentingan minoritas harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno kriteria negara demokrasi adalah; negara terikat pada hukum, kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Selanjutnya Affan Gaffar (pakar politik UGM) menyebutkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah *political order* pemerintah merupakan sistem yang demokratis atau tidak melalui ukuran akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum dan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar. Semua elemen tersebut berlaku secara universal di dalam melihat demokratis tidaknya suatu rezim pemerintahan.¹¹

¹¹ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 124-125

C. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan ciptakannya dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena Negara Kota (*City State*) Yunani Kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3000 orang. Selain itu ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmatinya.¹²

Demokrasi Yunani Kuno di Athena adalah demokrasi langsung yang dipraktikkan dalam suatu negara kota yang kecil. Para warga negara, walaupun tidak sepenuhnya, membuat keputusan-keputusan politik secara langsung. Demokrasi seperti dipraktikkan di Athena itu dapat dianggap sebagai suatu *working model* demokrasi murni dan dari model Athena itu dapat diturunkan beberapa prinsip operasional. Sudah tentu harus segera dicatat bahwa demokrasi model Athena itu, disamping mengandung kelemahan-kelemahan, tidak dapat dipandang sebagai suatu model mini dan demokrasi representatif modern, dan juga

¹² Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 110

jelas bahwa lembaga-lembaga serta pemikiran para tokoh demokrasi Athena tidak dapat ditransplantasikan ke dunia modern. Akan tetapi tetap ada persamaan-persamaan mendasar antara demokrasi Athena dan demokrasi moderen.

Tokoh-tokoh demokrasi Yunani Kuno itu antara lain adalah Solon, tokoh pembuat hukum (683-558 SM), Cleisthenes, bapak demokrasi Athena (C. 508 SM), Pericles, jendral-negarawan (490-429 SM), dan Demosthenes, negarawan-orator (385-322 SM). Masing-masing dengan kemampuannya membela demokrasi sebagai sistem politik yang terbaik. Hanya saja sejarah Yunani menunjukkan bahwa periode demokrasi lebih sering merupakan periode perkecualian. Yang mewarnai kehidupan politik Yunani pada beberapa abad sebelum masehi itu adalah sistem kediktatoran, tirani atau oligarki, baik sipil maupun militer. Bahkan benih-benih dan kecenderungan demokrasi Athena itu akhirnya hancur ketika negara Sparta yang otoriter mengalahkan Athena dalam Perang Peloponnesia yang berlangsung selama 27 tahun (431-404 SM).

Pada masa itu kritik tajam terhadap demokrasi dilontarkan oleh tokoh-tokoh pemikir seperti Plato dan Aristotle sendiri. Kedua filosof ini bukan pendukung demokrasi, tetapi kritisi terhadap demokrasi. Keduanya menganggap, berdasarkan pengamatan mereka pada praktek demokrasi di Athena, bahwa demokrasi adalah suatu bentuk sistem politik yang “berbahaya” dan tidak praktis. Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosof dengan perhitungan, bahwa seorang raja sekaligus filosof mempunyai beberapa kelebihan, keutamaan dan pandangan jauh kedepan. Sedangkan Aristotle yakin

bahwa suatu pemerintahan berdasarkan pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog (penghasut) dan akhirnya merosot menjadi kediktatoran. Bahkan menurut Aristotle demokrasi mudah meluncur ke arah tirani. *Demos Cratia*, pemerintahan oleh rakyat yang dicoba dikembangkan di Athena pada abad-abad kelima dan keempat Sebelum Masehi justru dihindari oleh Plato dan Aristotle, dua orang penumbuh filsafat Barat.¹³

Gagasan demokrasi Yunani Kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan diciirikan oleh struktur oleh masyarakat yang feodal, kehidupan spritual dikuasai oleh Paus dan pejabat Agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Dengan demikian kehidupan sosial politik dan Agama pada masa itu hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum Agamawan. Karena itu demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).¹⁴

Dalam zaman pertengahan, demokrasi hanya merupakan selingan-selingan kecil yang tidak berarti ditengah-tengah rangkaian kecenderungan anti-demokratik yang demikian kuat. Di abad 13 memang ada eksperimen-eksperimen demokratik di Eropa, seperti misalnya terlihat di beberapa kota di Jerman Utara yang mendirikan Liga Hanseatik dan setelah itu ada beberapa pemerintahan provinsi dengan sistem kontan di Swiss. Sementara itu desa-desa di Asia, termasuk di Nusantara, barang kali juga mempraktekkan beberapa prinsip demokrasi, antara

¹³ Amien Rais, "Pengantar", *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), viii-ix

¹⁴ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 125-126

lain, misalnya dengan memberikan hak kepada warga desa untuk memilih pemimpin mereka. Akan tetapi kenyataan seperti ini tidak punya pengaruh penting bagi pertumbuhan demokrasi seperti digambarkan dalam alam pikiran modern.¹⁵

Namun demikian menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan untuk menghidupkan demokrasi. Lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) sebagai suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculnya demokrasi empirik. Dalam marga Charta ditegaskan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus (*proveleges*) bawahannya. Selain itu piagam tersebut juga memuat dua prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.¹⁶

Baru pada zaman pencerahan (*enlightenment*) di abad-abad 17 dan 18 pemikiran-pemikiran demokratik muncul di atas permukaan. Jonh Lucke , Jean Jacques Roussea, Charles Louis Montesquieu, John Stuart Mill dan lain-lain mulai menolak absolutisme monarki dan kekuasaan suci dari para penguasa. Sementara itu di Amerika, Thomas Jefferson sangat menekankan kedaulatan rakyat. Tema-tema pemikiran politik pada zaman pencerahan berkisar pada masalah-masalah kebebasan, keadilan, hak-hak asasi manusia, pembatasan atas kekuasaan pemerintahan, hak untuk memberontak terhadap kesewenang-wenangan dan lain

¹⁵ Rais, *Demokrasi dan Proses*....., xiii

¹⁶ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 126

sebagainya. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa peletakan fondasi bagi demokrasi modern seperti kita kenal sekarang.¹⁷

Kiranya mudah difahami bahwa revolusi politik yang mambuka jalan bagi demokrasi modern tidak terjadi dalam suatu vakuum. Pemikiran-pemikiran sosial, politik, ekonomi dan Fiasfat di Eropa yang berkembang di abad 17-18 secara langsung atau tidak telah mendorong perubahan-perubahan di Inggris, Prancis, dan Amerika. Absolutisme monarki di Inggris diserang dengan gencar sampai munculnya parlemen di negara ini dengan mengambil bentuk House of Lords dan House of Commons; yang pertama bukan merupakan suatu lembaga berdasarkan pilihan rakyat, sementara yang kedua berdasarkan pilihan rakyat dengan representasi yang sangat terbatas. Kendatipun demikian lembaga-lembaga ini dalam perkembangannya menjadi semakin demokratik dan memperlancar proses demokratisasi monarki Inggris.

Berbagai konsep politik yang berkembang di masa itu terutama menyangkut masalah-masalah yang pada zaman kita menjadi pilar-pilar demokrasi; misalnya saja kebebasan dan kemerdekaan warga negara (*civil liberties*), pengagungan harkat dan martabat manusia, *rule of law* dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Hampir bersamaan dengan proses demokratisasi di Inggris, revolusi Amerika mengukuhkan cita-cita demokrasi dalam Deklarasi Kemerdekaanya pada 1776 dan merumuskan cita-cita secara lebih lengkap dalam konstitusi 1787. Sementara itu Revolusi Prancis pecah pada 1789 dengan

¹⁷ Rais, *Demokrasi dan Proses*....., xiv

semboyan sangat terkenal, yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan (*liberte, egalite, fraternite*). Tiga semboyan yang kemudian menjadi akar demokrasi itu menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menumbuhkan inspirasi pada banyak bangsa untuk mencari alternatif demokratik bagi sistem politik lama.

Dalam kaitan ini menarik untuk dicatat bahwa revolusi Amerika, walaupun tidak semasyhur Revolusi Prancis, jauh lebih berhasil dalam menerapkan sistem demokrasi tanpa menunggu waktu terlalu lama. Sebaliknya Revolusi Prancis mengalami *setback* (kemunduran) dan Prancis menyaksikan munculnya kembali rangkaian absolutisme hampir selama satu abad setelah keberhasilan awal revolusi. Baru pada abad 20 semboyan-semboyan Revolusi Prancis mempunyai makna dalam praktek politik di Eropa Barat.

Jalan yang ditempuh oleh Inggris, Prancis dan Amerika di atas dalam menuju dunia modern, menurut Barrington Moore, Jr., adalah jalan demokratik (*the democratic route*) dengan revolusi borjuis yang ditandai dengan kapitalisme dan demokrasi parlemen. Jalan kedua menuju dunia modern adalah juga bersifat kapitalis, dan sekaligus reaksioner dengan “revolusi dari atas” yang berkulminasi pada fasisme. Rute kedua ini ditempuh oleh Jerman dan Jepang menjelang perang dunia II. Jalan ketiga adalah rute komunis dengan revolusi petani yang disokong sampai tahap tertentu oleh kaum buruh, seperti diambil oleh Rusia dan Cina.¹⁸

Didalam sumber lain juga dapat dibaca bahwa upaya menciptakan suatu bentuk/sistem pemerintahan yang baru yang dapat menjamin hak/kepentingan

¹⁸ Rais, *Demokrasi dan Proses*....., xiv-xv

rakyat banyak (demokratis) sudah berlangsung sejak berabad-abad sebelum tarikh masehi. Salah seorang tokoh yang dalam hal ini tidak boleh dilupakan namanya adalah Solon, yang dikenal sebagai tokoh pencetus ide demokrasi bagi masyarakat negara Kota (polis) Athena di Yunani pada lebih kurang 600 sebelum masehi. Solon pada saat itu tampil untuk memimpin negara Kota Athena disaat masyarakat negara kota Athena dilanda oleh konflik bahkan perang saudara, saat polis Athena dipimpin oleh Draco. Kondisi masyarakat negara Kota Athena seperti yang dijelaskan tadi, dibenarkan oleh ungkapan dalam tulisan dibawah ini:

“Akan pecahkan perang saudara? Justru waktu kesulitan itu memuncak tampillah Solon, seorang arif bijaksana. Solon sendiri turunan bangsawan dan dalam perlawatannya ke berbagai-bagai negeri yang jauh telah berpengalaman dan berkenalan dengan pembentukan undang-undang bangsa-bangsa lain. Dianugerahkannya kepada bangsa Athena undang-undang yang menuntut tanggung jawab yang sebesar-besarnya daripada tiap-tiap warga negara untuk kepentingan umum dan seterusnya.

Tiap orang Athena yang berumur 20 tahun ke atas berhak mengambil bagian dalam permusyawaratan rakyat. Dalam rapat inilah dipungut suara tentang konsep undang-undang yang dimajukan oleh pemerintah. Di situ pula diputuskan soal perang dan soal damai. Tiap warga negara wajib mengikuti rapat-rapat permusyawaratan rakyat. Solon dengan tegas menuntut tanggung jawab tiap warga negara akan jalan hidup masyarakat dan janganlah hendaknya menyerahkan “politik” itu kepada orang lain karena takut menghadapi kesukaran-kesukaran.

Dengan undang-undang Solon itu, sangat boleh jadi Athenalah negara pertama yang berusaha sungguh-sungguh mempraktekkan bentuk pemerintahan yang tersukar, yaitu bentuk demokrasi.”¹⁹

Selanjutnya dari sumber lain dapat diperoleh gambaran tentang perkembangan demokrasi di Inggris, yang ternyata mempunyai ciri yang berbeda dengan perkembangan demokrasi di negara-negara lain termasuk negara Kota Athena.

Pertumbuhan demokrasi di Inggris didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan industri yang berpengaruh bagi kondisi sosial bangsa Inggris. Semula di Inggris, pemegang kekuasaan adalah kaum bangsawan/tuan-tuan tanah dan para ulama (para kesatria dan ulama). Evolusi perwakilan (pemerintahan demokrasi) di Inggris berlangsung secara bertahap dan dengan corak yang berbeda bila dibandingkan dengan situasi perkembangan demokrasi di negara-negara lain. Perkembangan yang dimaksud berlangsung dalam dua tahap, seperti yang dapat dibaca dalam sumber berikut ini :

“Kita dapat melihat adanya tingkat-tingkat yang jelas dalam evolusi sistem perwakilan ini. Dewan raja adalah dewan suatu herark. Bersama dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan berkumpullah para vasal dan pembesar gereja yang besar-besar, yang lebih merupakan bukan wakil-wakil tetapi kepala-kepala dari pada dua negara yang paling penting. Ia menunjukkan unsur-unsur perwakilan yang sesungguhnya pada waktu anggota “commons” (yaitu wakil-wakil kota-kota kecil)

¹⁹ Taopan, *Demokrasi Pancasila* (Sinar Grafika, 1989), 16

dipanggil untuk bertemu dengan para satria dan Ulama. Parlemen Inggris dari tahun 1295 mengalami perlengkapan tingkat pertama. "Tiap-tiap Sherrif" (kepala daerah "country", pent.) harus mengusahakan terpilihnya dua "knight" (satria. Pent.) dua "citizen" (warga kota. Pent.) dari tiap-tiap "cpty" (kota. Pent.) dan dua "burgers" (orang merdeka yang mempunyai hak pilih, pent.) dari tiap-tiap "borough" (dusun, pent.).

Pada mulanya mereka hadir dalam kedudukan yang amat rendah, bukan untuk mengeluarkan pendapat dan kemudian melaksanakan. Tetapi keharusannya itu sendiri yang menyebabkan adanya mereka, dan kesukaran untuk memungut kekayaan tanpa persetujuan kelas yang membayarnya, telah makin menambah kekuasaannya. Orang-orang yang tebal kantongnya dengan sendiri dipilih oleh pemilik-pemilik kekayaan dimasing-masing daerah, telah tau bagaimana harus meminta pada raja-raja untuk memberikan pertanggung-jawab atas pengeluaran-pengeluarannya, meskipun pada mulanya mungkin menolaknya seperti Hanry IV, menginsafi juga akan keharusan untuk memberikannya.

Tingkat kedua adalah pertumbuhan dari pada suatu majlis perwakilan yang semurni-murninya (meskipun pada mulanya sangat bersifat sempit). Garis feodal (karakteristik hidup) memisahkan dewan rakyat dari dewan bangsawan, tetapi kekuatan-kekutan yang telah memperlemah feodalisme sebaliknya memperkuat kedudukan kamar yang pertama itu. Dimanapun itu pertumbuhan itu tidak begitu dan seterusnya.

Sumber ini membuktikan kepada kita bahwa dimana-mana, proses pertumbuhan demokrasi selalu berliku-liku dan sulit bahkan menuntut pengorbanan; sama halnya yang telah terjadi sebelumnya di Atena, berabad-abad sebelum masehi.²⁰

Sementara itu perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dari segi waktu menjadi empat periode yaitu;

1. Periode 1945-1959; demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai, karenanya lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.²¹
2. Periode 1959-1965; ciri-ciri periode ini adalah dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan

²⁰ Taopan, *Demokrasi*....., 17-18

²¹ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 130

meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

3. Periode 1965-1998; landasan formil dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan-ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif.²²
4. Periode 1998-sekarang.

Pada periode sekarang, yaitu dimulai dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah memberi harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya revormasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis, karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi yang akan dibangun. Selain itu dalam fase ini pula bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar negara Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode sebelumnya.

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci; yakni, (1) komposisi elite politik, (2) desain institusi politik, (3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non

²² Azra, *Demokrasi, Hak Asasi.....*, 131-133

elite. (4) *peran civil society (masyarakat madani)*. Keempat faktor itu harus jalan secara sinergis (bekerja sama) dan berkelindan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam masa transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup revormasi dalam bidang besar. Pertama revormasi sistem (*constitutional revorm*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. Kedua, revormasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.²³

Harapan lain dalam suksesnya transisi demokrasi Indonesia adalah pada peran *civil society* (masyarakat madani) untuk mengurangi polarisasi (perlawanan) politik dan menciptakan kultur toleransi. Penelitian Seymour Martin Lipset membuktikan *civil society* juga dapat berpengaruh secara benefisial (bermanfaat) terhadap kultur politik. Ada dimensi edukasi (pendidikan) dalam *civil society*, yaitu partisipasi dalam mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, seperti penyederhanaan, sikap kompromi dan menghargai pandangan yang berbeda. Maka akan sangat memprihatinkan jika benar bahwa sekarang mulai muncul kecenderungan kantong-kantong *civil society* larut kedalam arus

²³ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 135

permainan politik. Sebab hal itu bukan hanya mengancam kemandirian civil society, tetapi juga semakin menguras modal demokrasi yang kita miliki.²⁴

Sementara indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis dalam era transisi menuju demokrasi di Indonesia antara lain adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan kederadaannya pada sebuah negara demokrasi, diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi negara RI (amandemen I-IV), adanya kebebasan pers, dijalankannya otonomi daerah dan sebagainya.²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁴ Azra, *Demokrasi, Hak Asasi*....., 137

²⁵ *Ibid*, 140

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Biografi M. Amien Rais

Dr. Muhammad Amien Rais lahir di Solo, 26 April 1944. Ayah beliau bernama Suhud Rais (alm.), lulusan Muallimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya menjadi pegawai Departemen Agama. Sedangkan ibu beliau bernama Ny. Sudalmiyah, sekitar 20 tahun menjadi Ketua Aisyiyah Surakarta, yaitu organisasi wanita Muhammadiyah. Kakeknya bernama Wiryo Soedarmo, beliau sebagai pendiri Muhammadiyah di Gembong Jawa Tengah. Anak kedua dari enam bersaudara itu mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah Solo mulai dari TK hingga SMA. Amien sendiri pernah mengenang bahwa seandainya pada tahun 1962 dia sudah ada Universitas Muhammadiyah, ia pasti tidak masuk UGM.¹

Amien Rais dikenal luas sebagai pakar politik dan belakangan populer sebagai salah seorang “tokoh reformasi” yang dengan gigih dan konsisten bersama para “tokoh reformasi” lain seperti Nurcholish Madjid dan Emil Salim, serta didukung secara aktif oleh para mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru. Menyelesaikan kuliahnya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1968. Disamping itu, dia juga meraih gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 1969.

¹ Amien Rais, *Membangan Politik Adiluhung* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 17-18

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Pada tahun 1974, dia menyelesaikan Progam Masternya dalam bidang Ilmu

Politik di University of Notre Dame, Amerika Serikat, dan berhasil memperoleh *Certificate on East European Studies* dari Universitas yang sama. Selanjutnya, gelar Doktor Ilmu Politik diraihinya dari University of Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1981, dengan disertasi yang membahas “Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir”. Pernah juga mengikut. Post-Doktoral Progam di George Wongsington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988.²

Sejak melontarkan isu suksesi kepemimpinan nasional pada sidang Tanwir ke-73 Muhammadiyah di Surabaya tahun 1993, M. Amien Rais telah menjadi seorang intelektual Muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan disegani. Amien Rais telah masuk dalam barisan elit intelektual Indonesia yang diperhitungkan dan didengar pemikirannya. Ia pun kemudian tidak pernah bosan-bosan mengungkapkan berbagai bentuk anomali (penyimpangan) sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesenjangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi, manipulasi dan praktek-praktek ekonomi-politik yang tidak mengindahkan nilai-nilai moral-etik dikritiknya secara berani.

Amien Rais adalah fenomena baru dalam setrum intelektualisasi Muhammadiyah kontemporer, beliau berhasil mendobrak “Kemapanan Kauman” Yogyakarta, meskipun ia merupakan pewaris tradisi Muhammadiyah yang digambarkan sebagai tradisi urban dan modern. Ia juga mendobrak kepasifan

² Amien Rais, *Tauhid Sosial* (Bandung: Mizan, 1998), 5

tradisi intelektual Muhammadiyah yang kurang berani melakukan kritik terhadap kekuasaan khususnya ditingkat suprastruktur. Keberanian dan kekokohan pemikiran Amien Rais merupakan akumulasi (perubahan) dari latar belakang yang cukup beragam, mulai dari tradisi modernisme Muhammadiyah, lingkungan kauman, serta pengalaman intelektual yang cukup panjang. Dibesarkan ditengah keluarga dan lingkungan yang mempunyai ikatan tradisi Muhammadiyah yang kuat, Amien Rais relatif bisa berkenalan dengan gagasan modernisme Islam sejak awal.³

Selain itu kekokohan pemikiran Amien Rais sangat dipengaruhi oleh perkenalan dan pengamatannya terhadap gerakan-gerakan Islam radikal di Timur Tengah, khususnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang menjadi objek penelitian disertasinya. Adapun kemungkinan yang paling mendekati kebenaran adalah kekokohan pemikiran Amien Rais mulai naik secara signifikan sejak ia berkenalan dengan gerakan-gerakan Islam radikal. Tulisan-tulisannya yang muncul pada tahun 1980-an atau setelah ia kembali dari Amerika, menunjukkan adanya korelasi positif antara pemikirannya dan pemikiran-pemikiran yang berkembang dikalangan kelompok Islam radikal Timur Tengah.⁴

Sebagai intelektual Islam dan sekaligus ilmuwan politik, ia merupakan kolumnis yang tergolong produktif dalam menuangkan gagasan-gagasannya. Antara lain telah menelurkan sejumlah karya seperti Cakrawala Islam, Keajaiban

³ Amarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 83-85

⁴ *Ibid*, 86-87

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kekuasaan, Moralitas Muhammadiyah, Visi dan Misi Muhammadiyah, dan lain-lain. Hingga kini ia merupakan satu diantara segelintir pakar di Indonesia yang mendalami masalah Timur Tengah. Pakar dari Universitas Gadjahmada tersebut, kini juga menjadi intelektual pertama yang duduk di pucuk pimpinan Muhammadiyah, organisasi keagamaan (modernis) terbesar di Indonesia.

Lewat sidang Tanwir Muhammadiyah di Solo 23-31 Desember 1994, beliau secara aklamasi dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, sampai digelarnya muktamar ke-43 Muhammadiyah di Banda Aceh 1-5 juli 1995. Sebelumnya, sejak 8 juli 1994 menjadi Pejabat Ketua PP sehubungan dengan meninggalnya Prof. K.H. Ahmad Azhar Basyir M.A. pada tanggal 28 juni 1994. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah di Aceh tahun 1995 Amien terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Dari kampus biru UGM, memang cukup banyak suara vokal dan kritis yang kedengaran sampai jauh. Tapi sosok Amien Rais menyuarak secara khas diantara irama keras 'langgam' Yogyakarta, ia bukan saja intelektual yang punya predikat pengamat masalah Timur Tengah; tetapi sebagai aktivis gerakan masyarakat yang sepak terjangnya kadang menimbulkan perasaan was-was. Misalnya, oleh sebageian mahasiswa ataupun koleganya di kampus, ia pernah dicap sebagai 'ekstremis' karena ke-Islamannya yang kental. Bahkan ia pernah dikaitkan dengan sebuah gerakan subversif (menggulingkan pemerintah), sehingga Ketua Jurusan Huubungan Internasional, Fisipol UGM ini pada waktu itu sampai

⁵ Rais, *Membangan Politik*, 15-16

perlu mengeluarkan 'senjata' untuk memperjelas posisinya di mata pemerintah, bahwa ia alumnus Lemhanmas.

Selain menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia juga menjadi salah seorang yang ikut membidani kelahiran ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang dinilai sangat dekat dengan kepentingan pemerintah. Seperti kita tahu, Amien merupakan salah seorang dari 49 orang penanda tangan pendirian ICMI di Malang, Desember 1990. Dalam kepengurusan ICMI ia antara lain telah duduk sebagai Ketua Dewan Pakar dan Asisten 1 Ketua Umum. Ia masih ditambah dengan jabatannya sebagai Direktur Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK).⁶

B. Konsep Demokrasi Amien Rais

Sejak awal kebangkitan nasional awal abad ini, para intelektual Muslim di Indonesia telah merespon demokrasi sebagai sistem yang harus dijalankan dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagaimana dideskripsikan (gambaran) dalam bab II, serikat Islam (SI) dalam kongres keduanya (1917) menuntut pemerintah kolonial untuk menerapkan sistem yang demokratis. Kemudian dalam sidang-sidang BPUPKI yang mendiskusikan tentang dasar negara dan konstitusi negara Indonesia, para pemimpin Muslim mendukung pelaksanaan diskusi-diskusi ini secara demokratis. Demikian pula selama periode Demokrasi Perlempenter dan

⁶ Rais, *Membangun Politik*....., 16-17

Demokrasi Terpimpin, partai-partai Islam serta intelektual Muslim mendukung demokrasi.⁷

Ada tiga alasan mengapa Amien Rais menjadikan demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi Islam ataupun pengembangan masyarakat negara. Pertama, demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Kedua, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.⁸

Menurut Amien Rais, sistem yang demokratis tidak dapat didefinisikan dengan adanya institusi-institusi formal negara, seperti adanya DPR, partai-partai politik, pemilu dan hak-hak warga negara. Demokrasi lebih baik didefinisikan dengan merujuk pada ide tentang “demokrasi substansial”. Ada beberapa sistem politik yang tampaknya demokratis, tetapi pada dasarnya otoritarian dan bahkan anti demokrasi. Karena itu, menurut Amien Rais, lebih tepat menentukan kriteria ketimbang berupaya mendefinisikannya.⁹

⁷ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 75

⁸ Masdar, *Membaca Pikiran.....*, 108

⁹ Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan.....*, 87

Secara umum, Amien Rais sepakat dengan definisi demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*government of the people, by the people and for the people*). Namun definisi itu harus dijabarkan dalam beberapa kriteria universal yang secara substansial kriteria-kriteria itu merefleksikan demokrasi sebagai sistem politik (dan ekonomi) yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan politik yang sesungguhnya.

Kriteria-kriteria demokrasi yang dikemukakan Amien Rais ada sembilan macam, diantaranya yaitu; pertama, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Secara ideal, partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk partisipasi yang memungkinkan hasil terbaik bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun karena itu tidak mungkin dilakukan, misalnya karena luasnya wilayah geopolitik (pengetahuan politik) dan banyaknya warga secara kuantitatif, maka partisipasi dilakukan tidak langsung dan pengambilan keputusan dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang dipilih dan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, menurut Amien Rais, salah satu yang perlu ditekankan disini adalah pemilihan wakil-wakil rakyat itu harus dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁰

¹⁰ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 108-109

Kedua, persamaan didepan hukum. Menurut Amien Rais, negara demokrasi selalu merupakan negara hukum. *Rule of law* harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang Agama, ras, status sosial. Persoalan yang sangat signifikan dalam negara demokrasi bukan saja soal perlakuan sama didepan hukum, tetapi juga proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaan produk-produk hukum atau aturan perundang-undangan dilapangan. Kedua aspek ini harus dilakukan secara konsisten dan adil dengan didukung oleh institusi kontrol yang independen.

Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Konsep ekualitas atau persamaan dalam demokrasi sebenarnya merupakan konsep yang utuh. Artinya, persamaan tidak bisa ditekankan pada salah satu aspek saja. Ekualitas hukum dan politik hanya akan lengkap jika dibarengi dengan ekualitas dibidang sosial ekonomi. Tidak cukup sebatas *de jure* (hukum), tetapi juga *de fekt* (kenyataan), agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Keempat, kesempatan pendidikan yang sama. Demokrasi bukan hanya merupakan sistem yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, tetapi juga sangat potensial untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena prinsip persamaan juga berlaku dibidang pendidikan. Menurut Amien Rais, dalam masyarakat yang mulai memasuki-tahap industrialisasi, pendidikan menjadi faktor krusial yang menentukan apakah seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya, maka menjadi jelas bahwa dalam masyarakat yang masih senjang

distribusi pendapatannya pasti sejang pula kesempatan pendidikannya. Tingkat pendidikan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.¹¹

Kelima, kebebasan yang dijamin Undang-Undang. Amien Rais menyebut empat macam kebebasan yang inheren (bersatu padu) dalam sistem demokrasi, yaitu kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau berorganisasi, dan kebebasan beragama. Selain empat macam kebebasan ini masih ada kebebasan lain yaitu kebebasan atau hak untuk mengajukan petisi atau permohonan (*freedom of petition*) dan hak untuk protes atau beroposisi. Signifikansi hak protes adalah untuk mencegah atau melakukan kontrol agar kekuasaan yang ada tidak mengarah kepada bentuk yang korup dan despotik (sewenang-wenang), karena pada umumnya kekuasaan cenderung digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id demikian.

Keenam, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Rakyat perlu mengetahui, tidak saja kualitas para pemimpinnya, melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk itu rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka bagi mereka berbagai alternatif dan cakrawala masalah yang dihadapi. Utamanya, rakyat harus *weel-informed* mengenai politik pemerintah sehingga tidak ada sikap *a priori* (masa bodoh) menerima atau

¹¹ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 109-110

menolak kebijakan, apalagi bila kebijakan itu menyangkut suatu masalah yang prinsipil dan fundamental.

Ketujuh, mengindahkan *fatsoen* atau etika politik. Demokrasi memiliki etika politik yang harus selalu diindahkan. Etika politik memang tidak pernah tertulis, tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang paham tentang nilai-nilai demokrasi. Tanpa suatu etika politik, maka politik atau kekuasaan yang ada akan cenderung menghalalkan segala cara. Dalam bahasa Agama (Islam), etika politik yang dibutuhkan adalah *al-akhlak al-karimah*.

Kedelapan, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki *privacy* (kehidupan privat atau hak-hak pribadi), seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi. Hak untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, bentuk pendidikan, harus dijamin dalam sistem demokrasi, kecuali kalau kebebasan itu sudah merugikan pihak lain.

Kesembilan, semangat kerjasama. Kerjasama diantara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam sistem demokrasi. Demokrasi di satu sisi menghargai sikap hidup individualistik sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun disatu sisi lain, demokrasi juga mengembangkan sistem kolektivitas atau kerja sama, misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.¹²

¹² Masdar, *Membaca Pikiran*....., 110-112

Dalam artikel lain, Amien Rais menyebutkan beberapa kriteria demokrasi yang lain agar menjadi efektif, yaitu : 1) kontinuitas mekanisme pengawasan dan pengimbangan diantara para penguasa serta antara mereka dan rakyat, 2) jaminan atas, paling tidak ada empat kebebasan, yaitu ; kebebasan berekspresi, kebebasan pres, kebebasan Agama dan kebebasan berkehendak, 3) implementasi kontrol rakyat terhadap para pemimpinnya, 4) pembagian kekuasaan diantara kelompok-kelompok sosial, 5) pemilihan wakil-wakil rakyat yang bebas.¹³

Apa yang dipaparkan di atas merupakan ekspresi pemikiran Amien Rais tentang demokrasi dalam relevansinya dengan nilai-nilai fundamental Islam. Pemikiran itu sendiri sudah memiliki basis teologis yang cukup mapan terutama karena adanya semangat tauhid didalamnya. Pemikiran Amien Rais itu tentunya mengandung *the advantages of back wardness* atau keuntungan-keuntungan keterbelakangan. Artinya, sebagai seorang intelektual yang telah mempelajari sejarah politik Islam secara mendalam, Amien Rais kemudian berusaha menghindarkan diri dari kekurangan-kekurangan atau irrelevansi pemikiran-pemikiran politik sunni sebelumnya dan sekaligus mengambil segi-segi positif yang masih aktual.¹⁴

¹³ Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan*....., 87

¹⁴ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 112

C. Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Amien Rais

1. Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia

Sejak kemerdekaan, kita pernah mempraktekkan tiga jenis demokrasi, yakni: demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan sekarang demokrasi pancasila. Sekalipun kita memberi embel-embel, kita tidak boleh lupa bahwa esensi demokrasi adalah empat macam kebebasan yang sangat asasi yang harus dimiliki oleh rakyat, yaitu: kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk sejahtera (*freedom of speech, freedom of religion, freedom of fear, freedom of want*). Esensi demokrasi juga mencakup partisipasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri, berjalannya mekanisme *check and balances*, dan tegaknya *rule of law*.¹⁵

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti, manusiawi, egaliter (persamaan) dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistik dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif atau menonjol, represif dan otoritarian.

¹⁵ Muhammad Najib, *Suara Amien Rais Suara Rakyat* et. al. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998),

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Meskipun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan dari pada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi (pembenaran). Karena itu beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahnya sebagai penganut sistem demokrasi atau sedang dalam proses menuju demokrasi.¹⁶

Demokratisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi dampak politik dari kemajuan masyarakat Indonesia, yaitu menerapkan kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kegiatan politik. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi perlu dikembangkan, baik oleh rakyat Indonesia yang semakin maju, maupun pihak pemerintah. Masyarakat yang kritis dan vokal, yang dihasilkan oleh keberhasilan pembangunan, perlu memahami kaidah-kaidah demokrasi dalam menyuarakan dan menyampaikan aspirasi mereka. Salah satu kaidah terpenting dari demokrasi adalah digunakannya cara-cara persuasif atau menyakinkan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut. Pembangunan kekerasan (secara koersif) hanyalah akan merusak proses demokratisasi yang sudah berjalan, karena aparat

¹⁶ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 1-2

keamanan akan semakin lebih keras dalam menangani kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁷

Adapun kaidah kedua yang perlu diperhatikan oleh warga masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi mereka adalah tidak menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi. Yang dikritik seyogyanya adalah kebijaksanaan (*policy*) pemerintah., bukan pribadi pejabat pemerintah. Kritik terhadap pribadi pejabat pemerintah dapat dengan mudah menimbulkan reaksi keras dari pejabat tersebut, yang dapat saja diikuti dengan tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga masyarakat bersangkutan. Bila ini terjadi proses demokratisasi menjadi hambatan karena terciptanya kecurigaan yang semakin besar terhadap masyarakat yang ingin memperjuangkan aspirasinya.

Pada pihak pemerintah sendiri, demokratisasi menuntut adanya permissiveness (perizinan) yang besar. Hal ini berarti bahwa pemerintah mengizinkan warga masyarakat menyuarakan aspirasi mereka, baik melalui saluran-saluran yang ada (media massa) maupun dengan cara mendatangi secara langsung (*contacting*) adalah sangat efektif karena aspirasi rakyat dapat diterima langsung oleh pengambil keputusan politik. Di samping itu, kunjungan tersebut juga mampu menarik perhatian media sehingga liputan media akan memberitahukan hal tersebut kepada khalayak pengguna media di seluruh Indonesia.

¹⁷ Eep Saefulloh Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), xvii

Permissiveness mengharuskan berkurangnya rasa kecurigaan di pihak pemerintah terhadap maksud-maksud baik warga masyarakat dalam mengadakan kegiatan-kegiatan politik. Rasa curiga cenderung melahirkan tindakan-tindakan pencegahan yang dapat berdampak pada dibatasinya mereka. Berkurangnya kecenderungan warga masyarakat untuk menggunakan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi mereka.

Sikap lain yang perlu dikembangkan oleh pemerintah agar demokratisasi dapat berhasil adalah keterbukaan. Ini adalah istilah yang sudah digunakan secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Kadang-kadang artinya tidak lagi begitu jelas atau paling tidak muncul penafsiran yang berbeda terhadap arti kata tersebut. Dalam tulisan ini, keterbukaan mengacu kepada sikap pemerintah yang bersedia mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk kemudian membuat keputusan yang memenuhi tuntutan dan aspirasi tersebut. Jadi, ada dua tahap dalam keterbukaan, yaitu mendengarkan tuntutan rakyat dan memenuhi tuntutan rakyat. Hal ini sebenarnya bukanlah baru karena keterbukaan dalam pengetahuan tersebut adalah inti demokrasi.¹⁸

Sementara itu de-ide demokrasi bersifat univesal, rasio merupakan kualitas yang dimiliki setiap orang sebagai daya pertimbangannya dalam menentukan pilihan-pilihan, karena demokrasi akan bersifat toleran terhadap semua nilai, kecuali terhadap intoleransi itu sendiri. Dalam kaitan ini demokrasi menurut Karl Jaspers (1883-1969) sebagaimana yang dikutip oleh Rocky

¹⁸ Fatah, *Penghianatan Demokrasi*....., xviii

Gerung merupakan satu-satunya jalan yang paling raungkin bagi perkembangan manusia. Penjelasan Jaspers itu terkait dengan upaya penyebaran rasionalitas kepada seluruh bangsa, tidak hanya segelintir manusia saja. Demokrasi terus menerus mempromosikan kesetaraan (*equality*), yakni kesamaan hak (*equal rights*), agar semua manusia harus dipandang sebagai nilai yang utuh.

Karena itu demokrasi memiliki doktrin dasar yang tidak pernah berubah, yakni keikutsertaan anggota masyarakat, partisipasi rakyat dalam menyusun agenda politik yang dijadikan landasan pengambilan keputusan. Oposisi dalam demokrasi dimaksudkan diantaranya adalah untuk melatih publik menjatuhkan pilihan berdasarkan suatu kalkulasi rasional, hal ini memerlukan publik rasional yang dapat melakukan evaluasi berdasarkan akal sehat terhadap seluruh penampilan kekuasaan.

Oposisi berfungsi membangkitkan moral politik dari proses aleinasi diri, demokrasi berada dalam ancaman bila oposisi tidak berlangsung dalam parlemen. Meskipun kondisi rasional bagi politik oposisi sudah tersedia secara kelembagaan dengan terjadinya distribusi kekuasaan kedalam lembaga-lembaga politik yang saling melengkapi (*trias politica*). Tetapi kondisi ini rawan manipulasi, disebabkan oleh kepentingan elit dapat berkompromi untuk menahan tuntutan-tuntutan populer yang bersekala dari luar struktur kekuasaan politik formal, karena itu wilayah oposisi juga mencakup institusi-institusi independen yang tidak memiliki kepentingan langsung dengan kekuasaan.

Oposisi dalam perspektif kulturalis merupakan subkultural demokratis, dimana 'outsiders' atau orang-orang luar seperti kelompok-kelompok kepentingan, kelompok penekan, partai politik atau politisi dilindungi hak-hak politiknya untuk berperan sebagai 'kekuatan penyeimbang'. Oposisi memungkinkan terjadinya proses *check and balance* serta pengawasan terhadap kekuasaan untuk menghindari kesewenangan.¹⁹

2. Representasi Umat Harus Diperjuangkan

Prinsip Amien Rais bahwa perjuangan politik umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi. Kata demokrasi memang bisa ditafsirkan dengan berbagai ragam pengertian, tetapi Amien Rais ingin kembali pada esensi demokrasi bahwa kedaulatan itu harus diberikan kepada rakyat dan aspirasi dari rakyat harus mengejawantah didalam kehidupan eksekutif dan legislatif kita.

Umat Islam hanya bisa aman untuk membangun masa depannya kalau lewat demokrasi saja. Bahkan, Amien Rais yakin orang-orang yang suka bicara demokrasi dengan semangat yang tinggi, seringkali menyimpan sesuatu. Yakni, jika demokrasi benar-benar dilaksanakan, mereka justru kecut hatinya. Sebab, disitu peran umat Islam akan menjadi sangat *significant* atau menentukan.

Meski demikian, Amien Rais tidak percaya bahwa dengan demokrasi lantas mayoritas harus diunggulkan di atas minoritas, apalagi disertai adanya kecenderungan untuk sewenang-wenang. Bila ini terjadi, maka demokrasi

¹⁹ Tamrin, *Gagasan Demokrasi Amien Rais* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 7-8

tersebut palsu dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam sendiri, dimana kaum minoritas itu sangat dihormati, dilindungi dan diberi hak-hak politik sepenuhnya sebagai warga negara. Amien Rais yakin bahwa hanya demokrasi sajalah yang bisa memberikan keamanan, baik umat Islam sebagai mayoritas maupun umat lainnya sebagai minoritas.

Yang patut dicatat, demokrasi yang dimaksudkan bukan demokrasi politik belaka, tetapi juga harus menjamin adanya kesamaan oportunitas (kesempatan) dan kesamaan hasil dalam kehidupan sosial ekonomi. Demokrasi politik tanpa adanya keadilan sosial ekonomi masih amat pincang dan juga bertabrakan dengan ajaran Islam itu sendiri.²⁰

Adapun cara untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis memang harus melewati beberapa langkah. Pertama adalah pendidikan politik pada masa rakyat. Dengan pendidikan ini diharapkan mereka yang memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat, sekalipun berbeda dengan pendapat penguasa. Kedua, penguasa sendiri harus diyakinkan bahwa hanya mereka yang memiliki legitimasi atau keabsahan yang kuat kalau memang benar-benar didukung oleh rakyat, bukan karena ketakutan atau tekanan, tetapi karena kepercayaan. Ketiga Amien Rais yakin bahwa kaum intelektual mempunyai peranan yang besar didalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi. Meski untuk melakukan hal ini masih membutuhkan banyak waktu.

²⁰ Arief Afandi, *Islam Demokarasi Atas Bawah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122-123

Kelompok muslim harus punya keberanian moril untuk melakukan agresi (penyerangan) dan artikulasi atau persediaan kepentingannya tanpa basi-basi dan kata dekoratif atau menghiasi yang menyesatkan. Kita ingin berpartisipasi sebagai mayoritas, yang paling tidak selama seperempat abad lebih mengalami marginalisasi secara ekonomi. Hal ini harus dikatakan dengan terang benderang. Dan menurut Amien Rais proses yang harus digencarkan pada zaman sekarang dan masa yang akan datang itu adalah untuk menghentikan proses marginalisasi sosial ekonomi umat Islam.²¹

Karena itu representasi umat Islam itu penting didalam kehidupan legislatif dan terutama kehidupan eksekutif. Karena dari dua lembaga ini akan dibuat peraturan-peraturan dan juga keputusan-keputusan yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Jadi perubahan sikap mental penguasa orde baru, perubahan tingkat kedisiplinan, kejujurannya dan sebagainya tanpa adanya perubahan-perubahan dari atas, sulit mengaharapkan adanya transformasi yang menyeluruh yang kemudian bisa menyentuh lapisan bawah.

Sedangkan gerakan yang dilakukan untuk mencapai demokrasi harus berjalan dari atas dan bawah secara bersamaan. Ditingkat elit harus ada tekanan-tekanan yang tidak pernah berhenti untuk mengubah diri mereka. Mereka juga harus tau bahwa kelompok yang di atas punya tanggung jawab moral yang luar biasa untuk menyetop penyelewengan. Sementara yang di

²¹ Afandi, *Islam Demokarasi*....., 123-124

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 bawah juga harus diberi kekuatan moril untuk memasuki tahapan kekuatan yang baru, yaitu memantapkan demokrasi rakyat. Kalau secara stimultan yang di atas ditekan untuk membuka diri dan berpijak ke bumi supaya mereka tidak menjadi pemanfaat rakyat, dan yang dibawah didorong terus untuk berani mengemukakan aspirasinya, maka demokratisasi akan berjalan lebih cepat.²²

3. Pengaruh Islam terhadap pemikiran Amien Rais

Amien Rais menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan konstruksi syariah permanen tidak berfungsi sebagai kitab hukum, melainkan sebagai sumber hukum. Karena sebagai sumber hukum, maka al-Qur'an dan Hadist harus ditempatkan secara fleksibel dan kemampuan adaptif terhadap pemecahan-pemecahan masalah kehidupan manusia, tanpa harus bergeser dari prinsip-prinsip abadi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.²³

Negara adalah penjaga syariah, agar syariah tidak mengalami digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 deteriorasi atau kemunduran dan penyelewengan. Karena syariah sebagai sumber hukum ideal itu membutuhkan institusi yang mampu melaksanakan prinsip universalnya sekaligus menjaga pelaksanaannya dalam praksis kehidupan. Salah satu kesulitan Amien Rais adalah meletakkan keseimbangan antara syariah yang bersifat permanen dan abadi dengan tuntunan zaman yang bersifat dinamis dan kreatif, pada level ini Amien Rais berusaha membuat suatu teori atau pemikiran politik yang mampu melestarikan sekaligus bersumber dari

²² Afandi, *Islam Demokarasi*....., 125-126

²³ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 100

prinsip-prinsip dasar Islam (syariah) yang dikompromikan dan diakomodasikan dengan pemikiran-pemikiran kreatif yang bebas (ijtihad) sehingga ada elaborasi prinsip-prinsip syariah itu ke arah pemikiran politik kreatif dan responsif.²⁴

Namun Amien menolak adanya sebuah Negara Islam, karena al-Qur'an dan Hadist tidak merumuskan secara detail sebuah bentuk negara, jika terdapat perumusan tersebut maka negara yang diinginkan oleh Islam tidak akan tahan terhadap perubahan-perubahan zaman. Dengan menolak sebuah bentuk negara Islam yang baku ini, maka Amien Rais menerima dan membela negara demokrasi sebagai suatu sistem politik yang telah mengalami ujian sejarah peradaban selama berabad-abad.

Pemikiran Amien Rais tentang demokrasi tersebut dijelaskan oleh Masdar telah memiliki basis teologis yang cukup mapan, terutama karena adanya semangat tauhid didalamnya. Dimana salah satu persoalan yang ingin dipecahkan oleh pemikiran intelektual Sunni modern adalah persoalan hubungan antara Islam dengan negara, karena gagasan negara dalam Islam bersifat supranasional dalam bentuk negara Tuhan. Hal ini dapat dilihat beberapa ide demokrasi yang dikemukakan oleh Amien Rais yang dijelaskan oleh Uhlir disamping mengandung unsure teologis Islam dalam pemikiran politik Amien Rais tentang demokrasi, pemikiran ini juga pengaruh ide Barat, diantaranya:

²⁴ Tamrin, *Gagasan Demokrasi.....*, 84-86

Pertama, pemerintah harus dilandaskan kepada keadilan, keadilan merupakan nilai terpenting dalam hukum Islam, keadilan ini tidak hanya bermakna dalam kesetaraan di bidang hukum, tetapi juga keadilan social dan ekonomi. Kedua, sistem politik harus dilandaskan kepada sistem syura dan musyawarah, implikasinya adalah para pemimpin harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan bebas serta mereka hanyalah sebagai abdi rakyat. Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan yang tidak membedakan manusia atas jender, etnik, warna kulit, atau latar belakang sejarah, social atau ekonomi, dan lain-lain.

Dalam kaitan ini kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap penganut atheisme, meskipun dianjurkan berdamping hidup secara damai dengan non-Muslim. Pengertian kesetaraan disini adalah kesetaraan dalam bidang hukum, bukan kesetaraan faktual yang mencerminkan tidak adanya perbedaan diantara manusia sebagai ide komunis. Keempat, kebebasan yang diartikan sebagai kebebasan berfikir, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan sebagainya. Kebebasan dasarnya adalah kebebasan berfikir dan hak untuk memiliki sebagai kebebasan mendasar dalam Islam. Kelima, pertanggungjawaban para pemimpin terhadap rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka.

Secara harfiah memang tidak ada istilah demokrasi didalam Islam, akan tetapi Islam sangat menekankan penerapan prinsip musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan inti demokrasi. Namun, jika kita lebih cermat terlihat perbedaan cukup signifikan antara demokrasi ala Barat dengan musyawarah dalam Islam. Di dalam demokrasi ala Barat pendapat seorang profesor dengan

pendapat seorang yang buta huruf asal berjumlah separe tambah satu, maka akan dapat mengalahkan pendapat kaum cerdik cendikia yang berkaliber dunia sekalipun. Sedangkan pada musyawarah, faktor kualitas dan esseptabilitas peserta musyawarah turut menentukan nilai sebuah pendapat.²⁵

Dalam pendapat lain juga dijelaskan, bahwa tidak ada versi demokrasi yang khusus dalam Islam, tetapi nilai dan prinsip Islam mengandung gagasan universal tentang demokrasi. Satu prakondisi bagi demokrasi yang sesuai dengan prinsip Islam adalah prinsip-prinsip ini dapat difafsirkan dengan cara yang cocok dengan masyarakat modern, ini dilakukan melalui proses ijtihad yang berarti penafsiran penalaran mandiri guna menafsirkan kembali hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Muslim yang sedang berubah.

Dinyatakan bahwa konsep-konsep Islam seperti *syura'* (konsultasi), musyawarah (perundingan), dan musawa (kesetaraan) tidak hanya sesuai dengan demokrasi, tetapi jika ditafsirkan secara benar, dalam dirinya sudah mengandung sebetuk demokrasi. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan di seluruh wilayah publik, tetapi kebanyakan ilmuan Muslim membatasinya pada apa yang disebut dengan wilayah politik. Deliar Noer menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan ciri pokok Islam dan prasarat bagi pelaksanaan ijtihad.

²⁵ Fatwa, *Demokrasi Teistis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 146

Sedangkan A. Syaiffi menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak mereseptkan satu bentuk struktur negara tertentu sehingga organisasi politik bernapaskan Islam dapat selalu berubah, agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khusus masyarakat Muslim. Tetapi Islam harus didasarkan pada prinsip dasar permusyawaratan (syura).²⁶

Kalau kita amati dari beberapa ciri tatanan politik (political orders) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Setiap mekanisme pengambilan keputusan dalam demokrasi harus didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang diinstitutionalisasi dalam dewan perwakilan rakyat. Aksioma (kebenaran mutlak) ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa yang paling tahu tentang yang baik dan bersifat fungsional (masalah) bagi rakyat adalah rakyat itu sendiri. Aksioma ini sejalan dengan aksioma yang terdapat dalam hukum Islam bahwa yang paling tahu tentang sesuatu yang masalah bagi seseorang atau masyarakat adalah orang itu sendiri atau masyarakat tersebut. Karenanya manusia sebagai makhluk yang bebas, bermartabat dan berdaulat diberi wewenang untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan dan kebaikan mereka masing-masing. Dalam konteks ini Fahmi Huwaydi menjelaskan bahwa orang yang benar-benar memahami substansi demokrasi akan menemukan bahwa substansi tersebut terdapat dalam konsep Islam.

²⁶ Tamrin, *Gagasan Demokrasi*....., 40-41

Adapun tujuan paling hakiki dari demokrasi adalah, membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik sebagai individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi, baik sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan maupun yang termanifestasi dalam struktur masyarakat, akan mencegah kekuasaan yang otoritarian dan represif.

Kalau kita lihat dari arti hakekat demokrasi sesungguhnya Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah Agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dan ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi dan al-Khulafa ar-Rasidun pada awal Islam.²⁷

Dalam pemikiran politik Islam tidak ada pemisahan antara Agama dengan negara, politik dengan moral, semua teori politik yang lahir diangkat dari suatu asumsi bahwa pemerintahan Islam bisa eksis dengan kontrak ke-Tuhanan yang didasarkan kepada syariah. Karenanya aktifitas spekulatif orang Islam dalam hubungannya dengan negara selalu mempunyai basis ke-Agamaan dan metafisis sekaligus, hal ini disebabkan oleh paham-paham Islam lahir dari sebuah pergolakan politik, implikasi munculnya kelompok-kelompok politik

²⁷ Masdar, *Membaca Pikiran*....., 15-16

yang ada adalah munculnya persoalan-persoalan teologis. Dengan demikian ilmu atau diskursus politik yang lahir kemudian muncul merupakan bagian dari derivasi (asal mula) dan diskursus teologi, bukan sebagai puncak pemikiran intelektual.²⁸

Namun kondisi demokrasi di negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam sangat memprihatinkan. Bahkan orang seperti Shirin Ebadi, pemenang Nobel perdamaian dari Iran, dalam diskusi di Jakarta mengatakan bahwa pemerintahan di negeri-negeri Muslim itu telah memanipulasi demokrasi, sekaligus memanipulasi Agama. Mereka selalu bicara atas nama Tuhan, tapi dalam praktiknya mereka sangat otoriter. Dan yang lebih tragis, mereka, menurut Ebadi, adalah pelanggar hak-hak asasi manusia.

Sementara itu, Freedom House, sebuah lembaga *think tank* terkemuka, dalam hasil surveinya beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwa dari 192 negara diberbagai penjuru dunia, 121 negara tergolong negara demokratis yang melaksanakan pemilu. Tetapi, di antara berbagai negara Muslim hanya 11 dari 47 negara yang berhasil melakukan pemilihan pemerintah secara demokratis, atau hanya sekitar 23 persen saja. Sebaliknya, di negara-negara non-Muslim, terdapat 110 dari 145 pemerintahan yang terpilih secara demokratis, atau sekitar 76 persen. Akhirnya survei itu menyimpulkan, negara-negara non-Muslim tiga kali lebih demokratis dibanding negara-negara Muslim.²⁹

²⁸ Tamrin, *Gagasan Demokrasi*, 23-24

²⁹ Basyaib, *Membela*....., 232

Banyak sekali orang yang menyesalkan fakta di atas, tapi bagaimanapun ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah. Kita mau bicara setinggi apapun, kalau realitanya begitu dalam pengamatan orang-orang awam, apalagi di mata para pakar negeri-negeri Muslim itu terlalu banyak yang tidak demokratis.

Ada pula pandangan yang seolah mau melawan fakta itu dengan mengatakan bahwa demokrasi bersumber dari nilai-nilai Barat, dan karena itu tidak cocok, tidak perlu cocok, atau tidak perlu dicocokkan dengan Islam. Pandangan semacam ini dilandasi oleh paradigma pemikiran politik Islam yang didasarkan pada pendekatan legal-eksklusif dan bertumpu pada doktrin *us and them*, yaitu pandangan yang memilah antara kita dan mereka, yang sangat tidak sehat. Karena itu terhadap paradigma ini harus dilakukan semacam dekonstruksi (rancangan) lebih dulu. Paradigma legal eksklusif ini akan membuat posisi Muslim sangat *shariah-minded* (semangat). Semua hal harus dihubungkan dengan syariah, yang di artikan secara kaku dan literal serta tidak bisa menerima value lain.

Namun kita tidak bisa berasumsi bahwa nilai-nilai dari luar yang tidak terang-terangan disebut berasal dari Islam niscaya tidak benar. Asumsi ini sangat keliru. Kalau mau, kita bisa saja menghubungkan demokrasi dengan konsep musyawarah dalam Islam.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ أَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا عَظِيمًا لَأَقْصَوْا مِنْ حَوْلِكَ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ إِنْ اللَّهُ
 يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: ١٥٩)

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali Imran: 159)³⁰

Jadi pandangan dasar tersebut harus didekonstruksi sedemikian rupa, diubah menjadi pandangan politik Islam yang substantif dan inklusif. Dalam pandangan yang berpijak pada substantif-inklusif ini, politik Islam tidak dikonstruksi oleh hukum-hukum, tetapi dibingkai nilai-nilai etis (akhlak). Dengan kata lain, etika harus menjadi sumber pokok dari cara pandang dan sikap kita terhadap demokrasi, pluralis, hak asasi manusia dan lain sebagainya.

Sikap yang mengutamakan substansi dan inklusifitas akan membuat kita menghargai nilai-nilai yang baik, yang tak perlu dari mana sumbernya. Dalam pandangan ini, entah itu nilai demokrasi, hak asasi manusia, entah sumbernya dari Cina, Arab atau Barat, sepanjang itu memajukan prinsip atau tujuan-tujuan syariah (*maqosid as-syariah*), kita harus menerimanya. Yang penting intinya adalah untuk

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 1-Juz 30* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), 103

menegakkan keadilan, keterbukaan, kesetaraan dan sebagainya. Semangatnya lah yang harus kita ambil, bukan bentuk formalnya.³¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³¹ Basyaib, *Membela.....*, 232-233

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN AMIEN RAIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Demokrasi Tinjauan Umum

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Di jaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950, dari 83 UUD negara – negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%).

Demokrasi (Inggris: *Democracy*) secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni Demokratia. *Demos* artinya rakyat (*people*) dan *cratos* artinya pemerintahan atau kekuasaan (*rule*). Demokrasi berarti mengandung makna suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan kekuasaan oleh raja atau kaum bangsawan. Konsep demokrasi telah lama diperdebatkan. Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi sebagai ide dan tatanan politik telah menjadi perhatian para pemikir kenegaraan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Plato (429-437 S.M) dan Aristoteles (384-322 SM) tidak begitu percaya pada demokrasi dan menempatkan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk. Filusuf kenamaan ini lebih percaya pada monarkhi, yang penguasanya arif dan memperhatikan nasib rakyatnya. Sementara Plato dapat menerima demokrasi, dengan alasan jika suatu negara tersebut belum memiliki UUD, sedangkan

Aristoteles dalam format negara politeia yakni demokrasi dengan UUD atau demokrasi yang bersifat moderen.

Secara etimologi, demokrasi (*democratie*) adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan negara yang tertinggi, dimana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan (ke) rakyat (an) yang terhimpun melalui majelis yang dinamakan Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sementara itu Sri Soemantri mendefenisikan demokrasi Indonesia dalam arti formal (*indirect democracy*) sebagai suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR; dan demokrasi dalam arti pandangan hidup menurut Sri Soemantri adalah demokrasi sebagai falsafah hidup (*democracy in philosophy*).

Demokrasi memiliki pengertian yang ambigu serta tidak tunggal. Setiap negara dapat meng-klaim sebagai negara demokratis. Negara seperti Amerika Serikat, disebut sebagai demokratis termasuk negara-negara bekas komunis seperti Uni Sovyet dan negara Eropa Timur. Bahkan pengertian demokrasi seringkali dimanipulasi untuk kepentingan elit-elit penguasa. Dengan alasan untuk melindungi sebagian besar rakyat, para penguasa tidak jarang menindas dan (atau) mengurangi hak-hak rakyat, untuk mempertahankan status quo. Hal ini menunjukkan bahwa telah menjadi pilihan, tentu saja pilihan terbaik diantara pilihan terburuk yang ada. Masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam menerapkan demokrasi yang ideal. Ada yang menganut demokrasi liberal, monarkhi konstitusional, demokrasi pancasila dan sosial demokrasi.

Robert A. Dahl mengajukan lima kriteria bagi sebuah demokrasi yang ideal, yaitu; (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat yang tercakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Alfian mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Menurut Alfian, demokrasi memberikan toleransi adanya perbedaan pendapat atau pertikaian pendapat. Perbedaan atau pertikaian itu bisa diartikan sebagai sebuah konflik, konflik disini tidak mengarah kepada kerancuan demokrasi. Salah satu aksioma (kebenaran mutlak) dalam sistem politik demokrasi adalah bahwa demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*, karena demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak-hak dasar seperti hak menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan, berkumpul dan berserikat, sudah barang tentu memerlukan adanya aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa

adanya sebuah aturan main yang demikian, maka proses pelaksanaan hak-hak tersebut akan mengalami berbagai hambatan, karena adanya perbedaan-perbedaan dalam hal akses, kemampuan, status, gender, dan kelas sosial dan sebagainya..

Beberapa studi yang pernah dilakukan oleh Mahfud MD menghasilkan kesimpulan bahwa disepanjang sejarah Indonesia telah terjadi tarik-menarik antar politik yang demokrasi dan politik yang otoriter. Politik demokrasi dan otoriter selalu muncul secara bergantian melalui pergulatan politik yang kadangkala keras. Mahfud menguraikan bahwa dalam teks otentiknya semua konstitusi yang pernah atau sedang berlaku di Indonesia menetapkan demokrasi sebagai salah satu prinsip bernegara yang fundamental, tetapi tidak semua pemerintahan dan sistem politik yang lahir di Indonesia ini demokrasi, malahan ada kecenderungan bahwa demokrasi hanya terjadi pada awal kehadiran sebuah rezim, yang tampaknya menentukan implementasi prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu bagaimana demokrasi itu tidak hanya disebutkan sebagai prinsip konstitusi melainkan dielaborasi secara ketat didalam konstitusi itu sendiri.

Kebanyakan negara modern sekarang termasuk negara-negara yang baru mencapai kemerdekaan setelah perang dunia II usai semua menganut sistem demokrasi konstitusional. Yang menjadi ciri khas demokrasi konstitusional ialah adanya pemerintahan yang kekuasaannya terbatas dan tidak diperkenankan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Pembatasan-pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Pemegang kekuasaan dibatasi wewenangnya oleh

konstitusi sehingga tidak melanggar hak-hak dasar rakyat. Antara kekuasaan eksekutif dan cabang-cabang kekuasaan lainnya terdapat *check and balance*. Lembaga legislatif mengontrol kekuasaan eksekutif sehingga tidak keluar dari rel konstitusi.

Sementara itu demokrasi dalam Islam disebut musyawarah yaitu demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam baik konsep maupun praktik walaupun tidak harus menyebutnya “demokrasi Islam” dan apabila dikaji secara mendalam pada diskursus pemikiran teologis maka kedaulatan adalah di tangan Tuhan atau “kedaulatan Tuhan” (akan tetapi kalau dikaji berdasar wacana diskursus pemikiran politik, hal ini cenderung pada paham teokrasi atau teo-demokrasi; lawan dari demokrasi), sedangkan demokrasi yaitu, suatu doktrin atau system politik sekuler yang kedaulatannya berada di tangan rakyat atau “kedaulatan rakyat” yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).

Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita-ideal manusia sejangad, karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, Agama dan kebudayaan. Kekuatan wacana demokrasi sesungguhnya bukan hanya terletak pada kemampuannya untuk melintasi batas geografis dan primordial di atas, tetapi juga karena telah diterimanya sistem ini secara luas, baik pada level infrastruktur Negara. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui

partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, khususnya nilai-nilai persamaan keadilan, kebebasan, pluralisme, walaupun konsep-konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya negara tertentu.

B. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia

Menurut Anders Uhlin PhD dalam bukunya yang berjudul *Indonesia and the "Third Wave of Democratization"*, Amien Rais bukan saja seorang tokoh gerakan prodemokrasi, tetapi dia juga seorang pengajar demokrasi yang baik. Dia banyak menulis secara luas mengenai masalah politik yang bisa dijadikan acuan bagi kalangan demokrat di Indonesia, khususnya kalangan generasi muda Muhammadiyah. Entah karena beberapa tokoh pemimpin lain di Muhammadiyah lebih mendukung status quo gagasan-gagasan demokrasi Amien Rais ini kurang tersosialisasi dengan baik dikalangan anggota Pemuda Muhammadiyah.

Uhlin juga menjelaskan, bahwa Amien Rais telah menguraikan dengan tegas konsep demokrasi Islami yang dianutnya. Pertama, negara harus dilakukan di atas dasar atau sila keadilan. Yang dimaksudkan dengan keadilan di sini tidak sebatas pada keadilan didepan hukum bagi semua warganya, tetapi juga keadilan dibidang ekonomi dan sosial. Keadilan ('adalah) merupakan nilai yang sangat penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, kalangan Islam sebagai pendukung gerakan demokrasi harus juga memomorsatukan keadilan ini.

Kedua, sistem politik demokratis harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Ini berarti pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan karenanya mereka harus dipilih oleh rakyat melalui suatu proses pemilu yang bebas. Bagi Amien Rais, sistem monarki pada dasarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi, suatu sistem kerajaan dimana raja atau ratu hanyalah sebagai simbol pemersatu, lebih Islami daripada kerajaan dengan kekuasaan absolut. Dus, dalam pandangan Amien Rais yaitu, sistem politik di Kerajaan Inggris lebih Islami; daripada sistem di Kerajaan Saudi Arabia yang merupakan monarki absolut.

Ketiga, adanya prinsip persamaan hak bagi seluruh rakyat. Amien Rais menegaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan orang atas dasar perbedaan gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang ekonomi, sosial, dan asal usul keturunannya. Meski demikian, kaum muslimin harus bersikap tegas melawan atheisme. Mereka boleh saja diberi hak hidup. Tetapi, dalam kondisi apa pun, kaum atheis tidak boleh campur tangan dalam urusan masyarakat Muslim. Ini berarti, menurut Amien Rais, mereka secara legal diberi hak yang sama, tetapi tidak dalam arti faktual. Atas dasar prinsip ini pula, komunisme harus diganyang habis-habisan.

Keempat, soal kebebasan. Amien Rais secara tegas mengungkapkan, negara demokratis harus menjamin prinsip kebebasan yang menyangkut kebebasan berpikir, beragama, berbicara, bebas mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan, hak hidup secara aman dan tenteram dan juga bebas untuk bergerak kemana saja

sesuai dengan keinginannya. Lebih khusus, Amien Rais menekankan bahwa kebebasan terpenting dalam Islam ialah bebas berpikir dan bebas memilih.

Prinsip terakhir atau kelima ialah accountability. Para pemimpin pemerintahan harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada rakyat. Pemerintah yang telah bertindak secara opresif dan tidak bermoral boleh digusur dari kekuasaannya. Bagi Amien Rais, prinsip accountability dan keadilan menduduki peringkat yang sangat penting dalam Islam.

Dalam hal negara Amien Rais berpendapat bahwa, suatu negara bisa disebut sebagai negara demokrasi jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu; (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan didepan hukum, (3) distribusi pendapat secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persurat kabaran, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen atau tata krama politik, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerja sama dan (10) hak untuk protes. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa demokratisasi berarti melawan monopoli kaum politisi, pejabat dan teknokrat untuk begitu saja menentukan apa yang baik bagi masyarakat.

Adapun pemahaman Amien Rais terhadap ajaran agama Islam membentuk orientasi tingkahlaku politiknya dalam berhubungan dengan system politik Orde Baru, unsure kognisi, efeksi dan kompetensi dalam menentukan peran-peran politik yang dijalaninya selama proses transisi menuju demokrasi dipengarui oleh latar

belakang sosialisasi dirinya baik dalam lingkungan pendidikan, pergaulan keluarga, maupun media massa.

Selain itu Amien Rais juga berpendapat bahwa, mungkin benar mereka yang mengatakan bahwa musyawarah atau syura dapat disebut demokrasi, tetapi Amien secara sengaja berusaha mengelak untuk tidak menggunakan istilah demokrasi dalam konteks sistem politik Islam. Karena menurutnya, istilah demokrasi saat ini menjadi konsep yang disalah pahami, dalam pengertian bahwa beberapa negara, yang banyak atau sedikit anti-demokrasi, dapat menyebut sistem mereka demokratis. Tetapi hanya mengemukakan bahwa istilah demokrasi dewasa ini telah disalah pahami sesuai dengan kepentingan politik rezim tertentu. Amien mengemukakan tiga alasan dalam penerimaannya terhadap demokrasi :

1. Secara konsep dasar, al-Qur'an memerintahkan umat Islam agar melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka.
2. Secara historis, Nabi mempraktekkan musyawarah dengan para sahabat.
3. Secara Rasional, umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka, itu menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia Sebagai realisasinya, kemudian dibuat lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih oleh semua warga negara secara bebas, langsung, jujur dan adil. Institusi perwakilan rakyat inilah yang bermusyawarah untuk mengambil keputusan politik yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat pada kurun waktu terbatas dan tertentu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep demokrasi Amien Rais yaitu; Pertama, negara harus dilakukan di atas dasar atau sila keadilan. Yang dimaksudkan dengan keadilan disini tidak sebatas pada keadilan didepan hukum bagi semua warganya, tetapi juga keadilan dibidang ekonomi dan sosial. Kedua, sistem politik demokratis harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Ini berarti pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan karenanya mereka harus dipilih oleh rakyat melalui suatu proses pemilu yang bebas. Ketiga, adanya prinsip persamaan hak bagi seluruh rakyat. Amien Rais menegaskan bahwa Islam tidak membeda-bedakan orang atas dasar perbedaan gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang ekonomi, sosial, dan asal usul keturunannya. Keempat, soal kebebasan. Amien Rais secara tegas mengungkapkan, negara demokratis harus menjamin prinsip kebebasan yang menyangkut kebebasan berpikir, beragama, berbicara, bebas mendapatkan hak pendidikan dan pekerjaan, hak hidup secara aman dan tenteram dan juga bebas untuk bergerak kemana saja sesuai dengan keinginannya. kelima ialah accountability. Para pemimpin pemerintahan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada rakyat.

2. Pandangan Amien Rais terhadap berlakunya demokrasi di Indonesia yaitu

demokrasi merupakan suatu keharusan karena demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. Selain itu demokrasi juga sebagai sistem politik dan pemerintahan yang mempunyai akar sejarah panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Demokrasi juga merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.

B. Saran

Pemikiran tentang konsep demokrasi Amien Rais memang belum sepenuhnya dijalankan di negara kita yang tercinta ini, karena disebabkan masih adanya pemikiran tentang kurang yakinnya dalam hal berdemokrasi dan disamping itu juga masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa demokrasi tidak perlu diterapkan di Indonesia, karena demokrasi itu sendiri produk Barat.

Akhirnya penting perlu dikemukakan beberapa tema pokok yang dapat dijadikan permasalahan oleh mahasiswa berkaitan dengan pembahasan mengenai pemikiran Amien Rais, diantaranya adalah tentang Agama, negara, dan masih

banyak lagi pemikiran Amien Rais yang perlu dikaji dan dikembangkan lebih dalam.

Dan akhirnya, hanya dialah yang mempunyai segala kesempurnaan dan berkat inayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Abdillah, Masykuri, 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yogya
- Afandi, Arief, 1997. *Islam Demokarasi Atas Bawah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azra, Azyumardi, 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media
- Basyaib, Hamid (Ed), 2006. *Membela Kebebasan*, Jakarta: Pustaka Alvabet
- Clark, John. 1995. *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, ter. Godril Dibyo Yuwono Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- E.P. Dutton & Co. 1955. *Demokrasi Sebuah Pengantar*. M. Ketchum, Richard (Ed). 2004, Yogyakarta: Niagara
- Fatah, Eep Saefulloh, 2000. *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Fatwa, 2001. *Demokrasi Teistis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Juliantara, Dadang. 2002. *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo: Pondok Edukasi
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka
- Khiruman, Badri (Eds). 2004. *Islam Dan Demokrasi*, Jakarta: PT Nimas Multima
- Mardalis, 1990. *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara
- Masdar, Amaruddin. 1999. *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Syaikh Abu. *Agama Demokrasi*, Jateng: Kafayeh Cipta Media
- Najib, Muhammad, 1998. *Suara Amien Rais Suara Rakyat et. al.* Jakarta: Gema Insani Press
- Nazir, Muhammad, 1998. *Metode Penelitian* Jakarta: ghalia Indonesia

- Penyusun, Tim, 2002. *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Alpha Mediatama
- Panjaitan Merphin, 2001. *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, Jakarta: Restu Agung
- Partanto, Pius A. & Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Yayasan Penyelenggara. 1971. *Al Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 1-Juz 30*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Rais, M. Amien, 1998. *Membangun Politik Adiluhung*, Bandung: Zaman Wacana Mulia
- 1986. "Pengantar", dalam *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES
- 1998. *Tauhid Sosial*, Bandung: Mizan
- "Representasi Umat Harus Diperjuangkan" dalam Afandi, Arief, 1997. *Islam Demokarasi Atas Bawah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 1998. "Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan" Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- 1987. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Bandung: Mizan
- Sudjana, Eggi, 1998. *Ham, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Yayasan As-Syahidah*
- Sudarto, 2002. *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syueb, Sudono. 2006. *Amien Rais & Demokratisasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka
- Taher, Elza Peldi (Ed). 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Paramadina
- Tamrin, 2006. *Gagasan Demokrasi Amien Rais*, Yogyakarta: Andalas University Press
- Taopan, 1989. *Demokrasi Pancasila*-Sinar Grafika
- Yazid, Abdullah et. al. 2007. *Demokrasi dan Hak Asai Manusia*, Malang: Progam Sekolah Demokrasi